

## ANALISIS SEKTOR UNGGULAN PEREKONOMIAN DI KABUPATEN BOGOR

Eka Rima Prasetya  
Universitas Pamulang, Banten  
ekhatyo11@gmail.com

**Submitted:** 09<sup>th</sup> August 2018/ **Edited:** 19<sup>th</sup> August 2018/ **Issued:** 01<sup>th</sup> October 2018

**Cited on :** Prasetya, Eka Rima. (2018). Analisis Sektor Unggulan Perekonomian Di Kabupaten Bogor. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 1(4), 21-30.

**DOI:** 10.5281/zenodo.1436986

<https://doi.org/10.5281/zenodo.1436986>

### ABSTRACT

This study aims to analyze the leading economic sectors towards economic growth in Bogor Regency. The method used is Location Quotient (LQ) and Shift Share (SS) analysis. The results showed that the water supply sector in Bogor Regency was the leading sector with a LQ value of 1,438, followed by 3 other sectors and there were 13 sectors that were not the leading sectors with LQ values below the average 1. Based on the results of Shift Share (SS) shows the manufacturing industry sector in Bogor Regency is in the top position and grows faster than the average provincial growth of 14,185,859.37, whereas if seen from its development, the information and communication sector is the most developed compared to other sectors However, when viewed from the competition in the regional share, the Wholesale and Retail Trade sector, Car and Motorcycle Repair has very strong competitiveness in the province of West Java.

**Keywords:** Leading Sector, *Location Quotient*, *Shift Share*, Economic Growth

### PENDAHULUAN

Kabupaten Bogor adalah salah satu wilayah di Indonesia yang paling terkenal, slogan kota hujan melekat kepada wilayah Bogor. Selain itu Kabupaten Bogor memiliki karakteristik wilayah yang menarik, di mana tanah yang subur dengan demografi pegunungan dan sungai menjadi ciri khas lain. Tidak hanya itu, keberadaannya yang dekat dengan Ibu Kota Jakarta menjadi lebih istimewa. Bogor menjadi wilayah yang tumbuh dengan berbagai karakteristik ekonomi, di antaranya ekonomi wisata, ekonomi pertanian, ekonomi perhutanan, ekonomi agrikultur, ekonomi peternakan, ekonomi

industri, ekonomi *real estate* dan lain sebagainya, sehingga menjadikannya sebagai salah satu kota yang paling cepat pertumbuhannya.

Pemerintah kabupaten Bogor menyadari banyak potensi yang dapat dikembangkan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Bogor. Oleh karenanya pemerintah kabupaten Bogor mulai memetakan sektor – sektor apa saja yang menjadi unggulan pada setiap lini. Misalnya pada sektor pariwisata merupakan unggulan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, pada sektor pabrik merupakan sektor unggulan dalam menekan angka pengangguran, pada sektor ritel merupakan sektor unggulan dalam mata pencaharian masyarakat, pada sektor pertanian merupakan sektor unggulan pada pangan dan lain sebagainya.

Pemerintah kabupaten Bogor terus melakukan perbaikan dalam berbagai sektor, misalnya dalam rangka mendukung efektivitas mobilisasi usaha pemerintah kabupaten membangun infrastruktur jalan yang layak. Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri pariwisata pemerintah membangun sistem izin mendirikan usaha dengan sistem *online* dan cepat. Dalam rangka mendorong meningkatnya produktivitas pertanian, pemerintah membangun infrastruktur jalan yang layak. Maka terbukti, hari ini kabupaten Bogor cukup maju dalam berbagai sektor ekonomi.

Namun pemerintah daerah kabupaten Bogor menyadari, pekerjaan rumah masih banyak. Masih perlu konsisten melakukan perbaikan-perbaikan di bidang birokrasi, di bidang infrastruktur, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan sehingga kualitas sumber daya manusia kabupaten Bogor dapat bersaing di tengah-tengah Masyarakat Ekonomi ASEAN.

**Tabel 1. PDRB Kabupaten Bogor tahun 2016 (Juta Rupiah)**

No	Sektor Ekonomi	2016
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	6.703.560,38
2	Pertambangan dan penggalian	3.494.445,21
3	Industri pengolahan	72.474.041,83
4	Pengadaan listrik dan gas	229.838,58
5	Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang	150.653,46
6	Konstruksi	11.865.543,59
7	Perdangaa besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	16.935.871,37
8	Transportasi dan pergudangan	4.143.391,31
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	3.313.579,47
10	Informasi dan komunikasi	3.222.393,22
11	Jasa keuangan dan asuransi	706.926,10

No	Sektor Ekonomi	2016
12	Real estate	1.107.035,44
13	Jasa perusahaan	269.409,67
14	Administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial	2.118.206,31
15	Jasa pendidikan	2.549.786,19
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	722.488,65
17	Jasa lainnya	2.385.104,21

Sumber: BPS Kabupaten Bogor, 2016

## LANDASAN TEORI

Pertumbuhan ekonomi daerah pada dasarnya adalah peningkatan kegiatan produksi secara riil (tidak termasuk kenaikan harga), baik dalam bentuk barang maupun jasa, dalam periode tertentu. Karena itu, pengukuran tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilakukan dengan menghitung peningkatan nilai PDRB pada tahun tertentu ke tahun berikutnya. Untuk menghindari kenaikan harga dalam perhitungan, maka data yang digunakan sebaiknya adalah PDRB dengan harga konstan bukan dengan harga berlaku (Sjarifal, 2016: 156).

Jhingan (2003), beberapa ahli ekonomi seperti Schumpeter dan Ursuzla Hick telah membuat perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan secara spontan dan terputus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi yang ada sebelumnya. Sementara itu pembangunan ekonomi adalah suatu proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya terencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi dengan ditunjang oleh faktor-faktor nonekonomi lainnya. Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad, 2010).

Suatu proses pembangunan tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai. Menurut Todaro (2006) proses pembangunan paling tidak memiliki tiga tujuan inti yaitu 1) peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok; 2) peningkatan standar hidup; dan 3) perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial. Di samping memiliki tujuan inti, pembangunan secara garis besar memiliki indikator-indikator kunci yang pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu indikator ekonomi dan indikator sosial.

Adapun teori-teori pembangunan ekonomi daerah sebagai berikut (Arsyad, 2010) yaitu Teori ekonomi neo klasik, Teori basis ekonomi (*economic base theory*), Teori lokasi, Teori tempat sentral, Teori kumulatif, Model daya tarik (*attraction*), dan Paradigma baru teori pembangunan ekonomi daerah. Dalam pembangunan ekonomi daerah diperlukan campur tangan pemerintah. Apabila pembangunan daerah diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar maka pembangunan dan hasilnya tidak dapat dirasakan oleh seluruh daerah secara merata (Arsyad, 2010).

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari pemerintah pusat dan menggunakan dan publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (*enginee of growth*).

Data PDRB merupakan informasi yang sangat penting untuk mengetahui *output* pada sektor ekonomi dan melihat pertumbuhan di suatu wilayah tertentu (Provinsi/Kabupaten/Kota). Dengan bantuan data PDRB, maka dapat ditentukannya sektor unggulan (*leading sector*) di suatu daerah/wilayah.

Sektor unggulan perekonomian adalah sektor yang memiliki ketangguhan dan kemampuan tinggi sehingga dapat dijadikan sebagai tumpuan harapan pembangunan ekonomi. Sektor unggulan merupakan tulang punggung dan penggerak perekonomian, sehingga dapat juga disebut sebagai sektor kunci atau sektor pemimpin perekonomian suatu wilayah. Dengan demikian, sektor unggulan merupakan refleksi dari suatu struktur perekonomian, sehingga dapat pula dipandang sebagai salah satu aspek penciri atau karakteristik dari suatu perekonomian (Deptan, 2005).

Sektor unggulan adalah sektor/sub sektor yang mampu mendorong kegiatan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan di suatu daerah terutama melalui produksi, ekspor dan penciptaan lapangan pekerjaan sehingga identifikasi sektor unggulan sangat penting terutama dalam rangka menentukan prioritas dan perencanaan pembangunan ekonomi di daerah. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita dianggap merefleksikan tingkat kekayaan daerah (Tadjoedin, suharyo, & S, 2001)

## METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu: PDRB kabupaten Bogor dan propinsi Jawa Barat tahun 2012-2016. Berikut metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Analisis *Location Quotient* (LQ) untuk menentukan sektor unggulan dan non unggulan perekonomian di Kabupaten Bogor
2. Analisis *Shift Share* (SS) untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sektor perekonomian di Kabupaten Bogor

Analisis *Location Quotient* atau disingkat LQ. Arsyad (2010), menjelaskan bahwa dalam teknik LQ ini kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi ke dalam dua golongan, yaitu: Pertama, Sektor basis adalah sektor ekonomi yang mampu untuk memenuhi kebutuhan baik pasar domestik maupun pasar luar daerah. Kedua, Sektor non basis merupakan sektor ekonomi yang hanya mampu memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri, sektor seperti ini dikenal sebagai sektor non unggulan.

$$LQ = (Si/S) / (Ri/R)$$

Keterangan:

LQ = nilai *Location Quotient*

Si = produksi sektor di daerah analisis (Kabupaten Bogor)

S = total PDRB di daerah analisis

Ri = produksi sektor di daerah referensi ( provinsi jawa barat)

R = total PDRB di daerah referensi

Apabila nilai  $LQ > 1$  menunjukkan bahwa sektor i termasuk sektor basis, artinya sektor tersebut mempunyai peranan ekspor di wilayah (kabupaten/kota) tersebut. Jika  $LQ < 1$  menunjukkan bahwa sektor i termasuk sektor non basis, artinya wilayah (kabupaten/kota) tersebut akan mengimpor dari daerah lain.  $LQ = 1$  berarti suatu wilayah (kabupaten/kota) dengan wilayah pembanding yang lebih luas (provinsi) mempunyai derajat spesialisasi yang sama.

Analisis *Shift Share* atau disingkat (SS) mengkaji kinerja berbagai sektor ekonomi yang berkembang di suatu daerah dan membandingkannya dengan perekonomian regional maupun nasional. Dengan teknik ini, selain dapat mengamati penyimpangan dari berbagai perbandingan kinerja perekonomian antar wilayah, maka keunggulan

kompetitif (*competitive advantage*) suatu wilayah juga dapat diketahui melalui analisis *Shift Share*, analisis tersebut dapat digunakan untuk mengkaji pergeseran struktur perekonomian daerah dalam kaitannya dengan peningkatan perekonomian daerah yang bertingkat lebih tinggi. Perekonomian daerah yang didominasi oleh sektor yang lamban pertumbuhannya akan tumbuh di bawah tingkat pertumbuhan perekonomian daerah atasnya. Komponen Pertumbuhan Wilayah.

1. Komponen Pertumbuhan Regional (PR)

$$PR_{ij} = (R_a)Y_{ij}$$

Keterangan:

$PR_{ij}$  = komponen pertumbuhan regional sektor i untuk wilayah j

$Y_{ij}$  = pendapatan dari sektor i pada wilayah j pada tahun dasar analisis

2. Komponen Pertumbuhan Proporsional (PP)

$$PP_{ij} = (R_i - R_a)Y_{ij} ;$$

$PP_{ij}$  adalah komponen pertumbuhan proporsional sektor i untuk wilayah j. Apabila:  $PP_{ij} < 0$ , menunjukkan bahwa sektor i pada wilayah j pertumbuhannya lambat.  $PP_{ij} > 0$ , menunjukkan bahwa sektor i pada wilayah j pertumbuhannya Cepat

3. Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW)

$PPW_{ij} = (r_i - R_i)Y_{ij}$  ; di mana  $PPW_{ij}$  adalah komponen pertumbuhan pangsa wilayah sektor i untuk wilayah j. Apabila:  $PPW_{ij} > 0$ , berarti sektor i pada wilayah j mempunyai daya saing yang baik dibandingkan dengan wilayah lainnya.  $PPW_{ij} < 0$ , berarti sektor i pada wilayah j tidak dapat bersaing dengan baik apabila dibandingkan dengan wilayah lainnya.

4. Persentase ketiga pertumbuhan wilayah dapat dirumuskan :

$$\%PN_{ij} = (PN_{ij}) / Y_{ij} * 100\%$$

$$\%PP_{ij} = (PP_{ij}) / Y_{ij} * 100\%$$

$$\%PPW_{ij} = (PPW_{ij}) / Y_{ij} * 100\%$$

## HASIL PENELITIAN

Berdasarkan nilai perhitungan analisis LQ yang dilakukan terhadap tujuh belas sektor perekonomian yang ada di Kabupaten Bogor pada tahun 2012 -2016 dengan mengacu PDRB atas harga konstan menurut lapangan usaha, maka didapatkan hasil yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. Hasil analisis nilai Rata-rata LQ kabupaten Bogor tahun 2012-2016**

No	Sektor Ekonomi	Rata-rata LQ
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	0,650
2	Pertambangan dan penggalian	1,264
3	Industri pengolahan	1,275
4	Pengadaan listrik dan gas	0,348
5	Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang	1,438
6	Konstruksi	1,066
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	0,800
8	Transportasi dan pergudangan	0,651
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	0,990
10	Informasi dan komunikasi	0,650
11	Jasa keuangan dan asuransi	0,211
12	Real estate	0,722
13	Jasa perusahaan	0,493
14	Administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial	0,800
15	Jasa pendidikan	0,702
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0,699
17	Jasa lainnya	0,881

Sumber : BPS Kabupaten Bogor, 2016

Hasil perhitungan dengan menggunakan analisis LQ menunjukkan bahwa dari tahun 2012-2016 terdapat 4 sektor yang menjadi sektor unggulan ekonomi atau sektor basis yakni Pertambangan dan penggalian, Industri pengolahan, Pengadaan air, Konstruksi terbukti dengan nilai rata-rata LQ di atas 1 sedangkan 13 sektor yang lain masih belum menjadi sektor unggulan atau tidak menjadi sektor basis di kabupaten Bogor dengan nilai  $LQ < 1$ .

Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat dikatakan bahwa kabupaten Bogor harus memperhatikan kembali 13 sektor yang belum menjadi basis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kabupaten Bogor, sedangkan untuk 4 sektor yang sudah menjadi basis makin ditingkatkan dan dipertahankan dengan baik.

Analisis ini mengasumsikan bahwa perubahan pendapatan, produksi atau tenaga kerja suatu wilayah dapat dibagi menjadi tiga komponen pertumbuhan yaitu komponen pertumbuhan regional (PRI), komponen pertumbuhan proporsional (PPI) dan komponen

pertumbuhan pangsa wilayah (PWI). Analisa *shfit-share* dilakukan dengan menggunakan data dua titik tahun, yaitu tahun 2012 dan tahun 2016. PDRB atas dasar harga konstan untuk tahun 2011 dan 2015 yang digunakan dalam perhitungan *shift-share*, masing-masing untuk Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat dengan hasil perhitungan analisa shift-share secara rinci dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3. Hasil analisis Shift-share kabupaten Bogor terhadap provinsi jawa barat tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)**

No	Sektor*	Pri	Ppi	Pwi
1	A	1.353.986,19	-731.203	446.437
2	B	817.931,67	-827.299	100.155
3	C	14.185.859,37	-437.621	-305.819
4	D	47.560,75	-27.372	11.736
5	E	28.647,85	3.573	-780
6	F	1.998.177,02	286.403	1.265.952
7	G	3.150.011,81	-826.306	1.504.026
8	H	659.204,25	280.089	275.145
9	I	584.633,20	174.715	121.398
10	J	443.243,85	854.253	80.426
11	K	123.5151,75	86.865	-17.441
12	L	206.689,16	-3.067	43.318
13	M,N	47.961,46	21.510	356
14	O	472.021,60	-321.624	3.586
15	P	395.386,51	390.582	118.496
16	Q	104.598,30	131.502	51.124
17	R,S,T,U	405.734,30	253.454	37.535

Sumber : BPS Kabupaten Bogor, 2016

Keterangan sektor; A(Pertanian, kehutanan dan perikanan), B(Pertambangan dan penggalian), C(Industri pengolahan) D(Pengadaan listrik dan gas), E(Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang), F(Konstruksi), G(Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor), H(Transportasi dan pergudangan), I(Penyediaan akomodasi dan makan minum), J(Informasi dan komunikasi), K(Jasa keuangan dan asuransi), L(Real estate), MN(Jasa perusahaan), O(Administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial), P(Jasa pendidikan) Q(Jasa kesehatan dan kegiatan sosial), R S T U (Jasa lainnya).

Berdasarkan tabel (Pri), sektor industri pengolahan yang memiliki pertumbuhan paling cepat di Kabupaten Bogor bila dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata provinsi dengan nilai 14.185.859,37 diikuti oleh 16 sektor yang lain, sedangkan sektor pengadaan listrik dan gas merupakan sektor yang memiliki pertumbuhan paling lambat dengan nilai Pri sebesar 47.560,75. Pri yang bernilai positif mengandung makna bahwa sektor di wilayah tersebut tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan provinsi rata-



rata. Sebaliknya, PR yang bernilai negatif mengandung makna bahwa sektor di wilayah tersebut tumbuh lebih lambat dibandingkan pertumbuhan provinsi rata-rata.

Pertumbuhan Proporsional dalam tabel (Ppi) Kabupaten Bogor sebagian besar bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sektor di kabupaten Bogor relatif berkembang, namun terdapat 7 sektor yang memiliki nilai negatif. Berdasarkan hasil analisis tabel 4.1 diketahui bahwa nilai Ppi tertinggi adalah sektor informasi dan komunikasi sebesar 854.253 hal ini menunjukkan sektor tersebut memiliki tingkat perkembangan yang sangat cepat dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya.

Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah dalam tabel (PWi) menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor memiliki daya saing yang sangat baik, hal ini nampak dari nilai komponen PWi yang hampir seluruhnya bernilai positif dan 3 sektor memiliki daya saing yang rendah karena nilai Pwi negatif. Sektor perdagangan eceran dan besar mempunyai nilai Pwi tertinggi sebesar 1.504.026 artinya sektor tersebut memiliki pangsa wilayah paling tinggi dan daya saing yang sangat baik, sedangkan sektor industri pengolahan mempunyai nilai negatif sebesar -305.819 artinya sektor tersebut kurang baik karena dianggap kalah bersaing dengan produk-produk yang dihasilkan dari luar yang masuk ke kabupaten Bogor. PWi menunjukkan kemampuan atau daya saing suatu sektor di regional terhadap sektor yang sama pada skala provinsi. Jika nilainya positif, maka berdaya saing tetapi jika nilainya negatif maka tidak berdaya saing.

## **KESIMPULAN**

Hasil analisis di atas, maka dapat dikemukakan kesimpulan penelitian sebagai berikut.

1. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat 4 sektor unggulan ekonomi di Kabupaten Bogor yakni sektor pengadaan air, industri pengolahan, pertambangan dan penggalan, dan sektor konstruksi, sedangkan 13 sektor lainnya belum menjadi sektor unggulan.
2. Terdapat sektor di Kabupaten Bogor tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan provinsi rata-rata yakni Sektor industri pengolahan memiliki nilai (Pri) tertinggi pertama adalah yakni 14.185.859,37. Sebagian besar sektor-sektor di Kabupaten Bogor relatif berkembang dilihat dari nilai (Ppi) dengan nilai tertinggi 854.253 pada sektor informasi dan komunikasi, namun terdapat 7 sektor yang memiliki nilai negatif. Sektor perdagangan eceran dan besar mempunyai nilai Pwi tertinggi sebesar 1.504.026 artinya sektor tersebut memiliki pangsa wilayah

paling tinggi dan daya saing yang sangat baik, sedangkan 3 sektor lainnya memiliki nilai negatif artinya belum dapat bersaing dengan produk dari luar kabupaten Bogor.

Hasil penelitian di atas mengemukakan saran-saran penelitian sebagai berikut.

1. Penelitian ini belum komprehensif, karena hanya melihat sektor pertanian untuk kebutuhan penelitian berikutnya bagi yang berminat meneliti maka bisa meneliti seluruh sektor-sektor unggulan hingga dengan sub-sub sektor.
2. Untuk meningkatkan perekonomian dari sektor-sektor unggulan, maka pemerintah Kabupaten Bogor harus lebih terfokus kepada beberapa sektor unggulan agar Kabupaten Bogor memiliki sektor yang terspecialisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincollin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKP.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, 2016.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2016.
- Departemen Pertanian, Landasan Teori dan Fakta Empiris. 2005
- Jhingan, ML. 2003. *Ekonomi pembangunan dan perencanaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sjarifal. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tadjoedin, M.Z., Suharyo, I., & S.M. 2001. *Aspirasi terhadap ketidakmerataan: Disparitas Regional dan Konflik Vertikal di Indonesia*. Jakarta : UNSFIR Working Paper.
- Todaro, Michael P. 2006. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Alih Bahasa: Aminuddin dan Mursid. Jakarta: Ghalia Indonesia.